

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RPJMD Tahun 2017 – 2022 menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas atau unggulan. Sektor pariwisata saat ini dijadikan sebagai sektor penggerak perekonomian daerah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan otomatis meningkat juga pendapatan dan perekonomian masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 564.306 wisatawan dengan rincian sebagai berikut Tahun 2017 Wisatawan Nusantara sebanyak 359.901 Wisnus dan Wisatawan Mancanegara sebanyak 7.183 Wisman sedangkan pada akhir masa Renstra 2022 kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 553.752 wisnus dan 10.554 wisman.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi prioritas nasional sehingga Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan dan membangun infrastruktur dan sarana prasarana di destinasi pariwisata.

Kunjungan wisatawan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan secara keseluruhan, seperti berikut wisatawan nusantara Tahun 2016 sebanyak 342.513 wisnus sedangkan pada tahun 2017 menjadi 359.901 wisnus dan untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2016 sebanyak 5.106 wisman sedangkan pada tahun 2017 sebanyak

7.183 wisman. Untuk kunjungan wisatawan pada saat low sesion terjadi pada saat bulan menjelang bulan ramadhan sedangkan peak sesion terjadi bulan april dan oktober.

Bangka Belitung merupakan salah satu destinasi prioritas nasional dimana potensi yang dimiliki baik alam, buatan dan budaya sangat beragam dan tidak ternilai. Posisi wilayah yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan karena Bangka Belitung merupakan wilayah yang dilewati jalur perdagangan internasional seperti ALKI I sehingga memberikan suatu kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 20.. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun, luas wilayah darat

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencanangkan pembangunan sektor kepariwisataan dan pelestarian kebudayaan alam sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka penetapan kawasan objek wisata dan pelestarian budaya yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Jenis – jenis wisata yang akan dikembangkan di Bangka Belitung sangat beragam diantaranya :

- a. Wisata bahari
- b. Wisata budaya
- c. Wisata alam
- d. Wisata olahraga / minat khusus
- e. Wisata kuliner
- f. Wisata sejarah

Yang merupakan wisata yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh semua pihak dan masyarakat. Pariwisata tidak hanya mengandalkan wisata alam dan buatan saja tetapi harus juga melibatkan wisata budaya sebagai salah satu faktor pendorong utama karena budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata.

Pelestarian budaya wajib untuk dilindungi baik perlindungan internal maupun eksternal. Adat istiadat harus dilestarikan sehingga karakteristik suatu kawasan wisata dapat diperkuat. Dalam budaya terdiri dari seni dan adat istiadat yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan karena budaya merupakan karakteristik suatu wilayah sehingga harus dijaga keasliannya.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Yang mana Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Dan dapat kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Perencanaan secara umum juga dapat diartikan sebagai usaha menentukan cara terbaik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelibatan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan merupakan unsur utama dalam perencanaan partisipatif. Dimana pengertian perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif terhadap suatu kegiatan tertentu, tentang bagaimana mengelola sumber daya yang ada dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. pembangunan merupakan suatu fungsi utama dari manajemen pembangunan yang mutlak diperlukan mengingat kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata harus memiliki indikator pembangunan yang diperlukan selain untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan, juga untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih baik diperlukan aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki kapasitas intelektual, manajerial dan profesional sehingga membantu terwujudnya pelayanan prima. Aparatur yang ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan, akan mempercepat perubahan ke arah lebih baik yang kita inginkan. Ketepatan penempatan, pelatihan, mutasi dan rotasi pegawai yang lebih mengarah kepada kompetensi, juga akan mendorong akselerasi organisasi ke arah yang lebih maju.

Isu perubahan iklim, krisis ekonomi dunia, dan tumbuhnya gelombang ekonomi kreatif telah menyebabkan perubahan sikap dan tuntutan atas produk-produk wisata yang dihasilkan dari semula bersifat produk wisata massal yang tidak ramah lingkungan dan komunitas, menjadi kearah bentuk pembangunan produk wisata yang lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan dan memberikan apresiasi tinggi pada komunitas dan destinasi yang bersangkutan (*responsible tourism*) misalnya wisata budaya, wisata bahari, dan wisata kreatif serta peningkatan industri pariwisata yang berdaya saing. Isu-isu global dan nasional tersebut diatas telah menyebabkan perlunya pengembangan manajemen destinasi yang mampu mengantisipasi tuntutan kedepan.

Sebuah destinasi harus dapat berkembang secara dinamis dan belajar dari kebutuhan yang diperlukan secara cepat melalui perkuatan manajemen internal (*learning destination*). Cara-cara pengelolaan destinasi dengan pendekatan lama yang tidak memperkuat peran serta masyarakat akan tidak mampu menyikapi perubahan yang cepat ini.

Disamping harus berbasis pada masyarakat, pengelolaan dan pengorganisasian sebuah destinasi harus pula mampu merengkuh kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan wisatawan, kepuasankomunitas lokal, dan promosi sebagaimana konsep pengembangan manajemen destinasi (*DMO, Destination Management Organization*) termasuk untuk pengembangan desa wisata yang mengarah kepada tumbuh kembangnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata.

Perubahan paradigma ekonomi dan pariwisata dunia tersebut telah merubah pula kebutuhan akan produk wisata dari semula bersifat massal (*mass tourism*) yang lebih mengandalkan jumlah, menjadi bersifat penampilan budaya lokal (*cultural tourism*) yang lebih mengandalkan pengenalan budaya bersifat pasif, dan kemudian menjadi bentuk produk wisata berbasis kreativitas (*creative tourism*) yang lebih mengedepankan pengenalan dan pengembangan budaya lokal bersifat interaktif berbasis pada sentuhan kemanusiaan (*human touch*). Wisata budaya berbasis pada warisan budaya sebagai potensi utama pariwisata nasional telah berkembang luas tidak hanya pada obyek namun juga pada kawasan baik di perkotaan (kota pusaka) yang bahkan telah di inisiasi oleh pemerintah daerah (Jaringan Kota Pusaka), maupun di pedesaan.

Bidang pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam, wisatabahari, agrowisata, maupun wisata budaya. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut untuk menjadi obyek daya tarik wisata yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih menghadapi kendala dan tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Pengembangan kepariwisataan Bangka Belitung tidak terlepas dari munculnya berbagai isu strategis pembangunan dimana dalam pembangunannya terdapat ketimpangan dalam pembangunan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, optimalisasi kinerja pemerintah daerah, lemahnya sinergitas antar unit kerja, pelibatan masyarakat, maupun pengembangan sumber daya manusia merupakan beberapa isu khusus yang

juga berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Dan selanjutnya untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan komitmen politik kepala daerah, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD yang berdurasi 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung tercapainya RPJMD tersebut. Sebagaimana RPJMD, dalam Renstra PD juga memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran teknis dan bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
20. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
22. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

23. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 36 Seri E);
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);

1.3 TUJUAN

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 – 2022 disusun agar dipahami dan dipedomani oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan industri pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berupa fisik maupun non fisik. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017- 2022 menggambarkan pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Kesamaan persepsi dan kesamaan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan dan diharapkan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kurun 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017-2022 untuk menciptakan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2017-2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Setiap instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II mempunyai rencana strategis tentang program – program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Rencana strategis dimaksud harus mencakup :

- a. Uraian tentang strategi dan faktor – faktor kunci keberhasilan organisasi;

- b. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;
- c. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 terdiri dari :

BAB I. : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggambarkan latar belakang penyusunan Renstra dan alur proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan peraturan perundangn yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II: GAMBARAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menggambarkan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta kondisi organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala OPD.

Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber dayam manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yang merupakan Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan pengarahannya terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022;
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan standar pelayanan minimal serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana;
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan;
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Menjelaskan ringkasan Renstra dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lembaga teknis Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Umum;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3. Seksi Kesenian.
- d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata;
 - 3. Seksi Destinasi Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Analisis Pasar Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi Pariwisata;
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
- f. Bidang Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Sumber Daya Pariwisata;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif;
 - 3. Seksi Kelembagaan Kepariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dideskripsikan sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan

bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Dan Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 3. penyelenggaraan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
 6. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 7. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Bidang Sekretariat

- a. Bidang Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang.
- b. Bidang Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 2. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan.
- b. Dalam pelaksanaan Bidang Kebudayaan memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunanrumusan kebijakan cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan kesenian tradisional;
 2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan kesenian tradisional;
 3. penyelenggaraan dan pengoordinasianbahan penyiapan pelaksanaan tugas pembantuan perfilman nasional, warisan budaya, dan kepercayaan kepada tuhan yang maha esa;
 4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporancagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan kesenian tradisional serta tugas pembantuan;
 5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 6. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 7. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata.
- b. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 2. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 3. penyelenggaraan penyiapan bahanpelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5 Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata.
- b. Dalam menjalankan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata memiliki fungsi, yaitu :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan analisis pasar pariwisata, promosi pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata;

2. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknisanalisis pasar pariwisata, promosi pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata;
3. penyelenggaraan penyiapan bahanpelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis analisis pasar pariwisata, promosi pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata;
4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.6 Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata

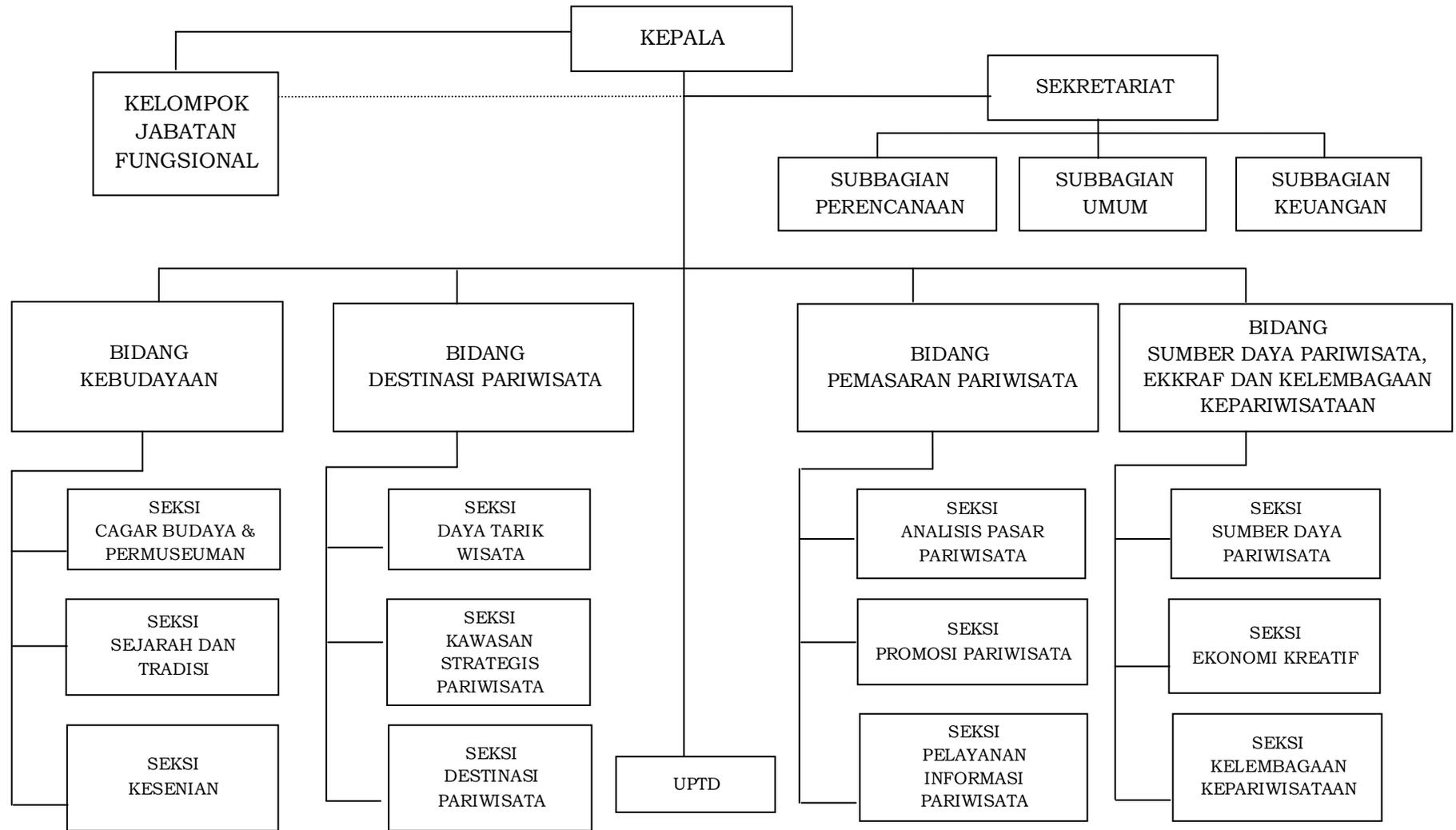
- a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataaan.
- b. Bidang Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataaan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi, yaitu :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataaan;
 2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataaan;
 3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataaan;
 4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam menjalankan roda pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional karena jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia sejumlah 68 orang terdiri dari 58 Pegawai Negeri Sipil dan 14 Tenaga Kontrak Kerja/Honorar, adapun rincian jumlah pegawai negeri sipil dan honorar dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang dan Eselonisasi
di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017

| Golongan / Ruang | Eselon | | | Non Eselon | | Jumlah |
|----------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | II | III | IV | Fungsional | Staf | |
| Golongan IV/d | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Golongan IV/c | - | - | - | - | - | - |
| Golongan IV/b | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Golongan IV/a | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Jumlah Golongan IV | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
| Golongan III/d | - | - | 11 | - | 1 | 12 |
| Golongan III/c | - | - | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Golongan III/b | - | - | - | 3 | 11 | 14 |
| Golongan III/a | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Jumlah Golongan III | - | - | 15 | 4 | 24 | 44 |
| Golongan II/d | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Golongan II/c | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Golongan II/b | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Golongan II/a | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Golongan II | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
| Jumlah Pegawai | 1 | 5 | 15 | 5 | 31 | 58 |
| Jumlah PHL | - | - | - | - | 14 | 14 |

sumber : sub bagian umum disbudpar

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017

| Pendidikan | Eselon | | | Non Eselon | | Jumlah |
|--------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | II | III | IV | Fungsional | Staf | |
| Doktoral /S-3 | - | - | - | - | - | - |
| Pasca Sarjana /S-2 | - | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 |
| Sarjana / S-1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 28 |
| Diploma /D-IV | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Diploma /D-III | - | - | - | 1 | 9 | 10 |
| Diploma /D-II | - | - | - | - | - | - |
| Diploma / D-I | - | - | - | - | - | - |
| SMA | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Total | 1 | 5 | 15 | 5 | 32 | 58 |

sumber : sub bagian umum disbudpar

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3.1 Gambaran Kinerja Pelayanan Urusan Dinas

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi 2 (dua) urusan Pemerintahan :

1. **URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN)**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi

masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

2. **URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN)**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaansarana wisata dan obyek wisata.

Target indikator sasaran RPJMD 2017-2022 untuk Urusan Pariwisata adalah pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara.

Realisasi pencapaian target selama lima tahun periode RPJMD termaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DISBUDPAR 2012-2016

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET IKU | | | | | KET |
|----|---|------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| A. | Urusan Kebudayaan | | | | | | |
| | Warisan Budaya Tak Benda | NA | 5 WBTB | 7 WBTB | 17 WBTB | 12 WBTB | |
| | Warisan Budaya Benda | NA | NA | NA | NA | NA | |
| B | Urusan Pariwisata | | | | | | |
| | Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 5.313 | 5.738 | 6.197 | 6.693 | 7.228 | |
| | Tingkat Kunjungan Wisatawan Nusantara | 431.558 | 470.398 | 512.734 | 558.880 | 609.179 | |
| | | | | | | | |

sumber :

1. bidang pengembangan pemasaran pariwisata
2. bidang kebudayaan

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Wisnus dan Wisman, antara lain :

- 1) Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, *website* (*bandungtourism.com*), dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata;
- 2) Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, Asosiasi Profesi, dan lain sebagainya);
- 3) Upaya lain yang telah dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pengelola Bandara (PT. Angkas Pura II), dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan RI.

Bila dilihat dari tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus lebih mengoptimalkan pelestarian budaya lokal dimana sampai dengan saat ini data yang dimiliki bidang kebudayaan belum terupdate berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan data tersebut diperlukan peran serta pemangku kepentingan dalam melestarikan budaya lokal Bangka Belitung. Selain itu terkait dengan penetapan indikator kinerja pelayanan yang ada, permasalahan yang muncul adalah ketika indikator kinerja yang disusun pada Renstra periode sebelumnya tidak mengacu indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut, yaitu:

- a) Indikator kinerja SPM;
- b) Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggara suatu urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
- c) Indikator yang telah dikembangkan secara mandiri berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi PD.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung adalah kinerja

pelayanan Perangkat Daerah sulit untuk diukur karena tidak jelas dan sangat terbatasnya skop indikator kinerja, juga permasalahan kurangnya keserasian, keterpaduan, sinkronisasidan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan antara Renstra K/L, Renstra PD Provinsi dan Renstra PD Kabupaten/Kota.

Dan faktor lainnya pada PD Provinsi, banyak capaian yang tidak dapat diukur sehingga berdampak terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi KepalaDaerah.

Tabel 2.5

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) DISBUDPAR 2012-2016

| No | INDIKATOR KINERJA | REALISASI IKU | | | | | KET |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| A. | Urusan Kebudayaan | | | | | | |
| | Warisan Budaya Tak Benda | NA | 2 WBTB | 5 WBTB | 7 WBTB | 7 WBTB | |
| | Warisan Budaya Benda | NA | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | | | | |
| B | Urusan Pariwisata | | | | | | |
| | Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 5.540 | 3.866 | 3.702 | 7.620 | 5.106 | |
| | Tingkat Kunjungan Wisatawan Nusantara | 364.962 | 376.593 | 510.367 | 541.421 | 342.513 | |
| | | 370.502 | 380.459 | 514.069 | 549.041 | 347.619 | |

2.3.2 Gambaran Kinerja Keuangan Dinas

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 20.571.252.500,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.579.622.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.991.630.500,- Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan pagu dana sebesar Rp. 22.127.965.959,- yang terdiri dari Rp. 6.444.143.859,- (29,12%) merupakan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Rp. 15.683.822.100,- (70,88%) adalah Belanja Langsung (BL).

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja, dapat dilihat dalam tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 – 2017

| Tahun | Total Pagu Anggaran (Rp.) | Pagu (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
|-------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung |
| 2016 | 20.571.252.500 | 13.991.630.500 | 6.579.622.000 | 11.040.042.372 | 6.218.758.350 |
| 2017 | 22.127.965.959 | 15.683.822.100 | 6.444.143.859 | 11.694.288.182 | 6.199.487.528 |

Sumber : Sub Bagian Keuangan Disbudpar

Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Jumlah Pentas Seni Tari dan Musik (Kali) | | | | NA | NA | NA | 35 pts | 122 pts | NA | NA | NA | 35 | 100 | | | | | |
| 2 | Promosi Pariwisata melalui expo nasional (kali) | | | | NA | NA | NA | 6 event | 4 event | NA | NA | NA | 6 | 4 | | | | | |
| 3 | Pengembangan objek wisata (paket) | | | | NA | NA | NA | 1 Kaw | 1 Kaw | NA | NA | NA | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org) | | | | 5.738 | 6.197 | 6.693 | 7.228 | 5.514 | 3.866 | 3.702 | 7.620 | 5.106 | 7.183 | | | | | |
| 5 | Daerah tujuan wisata (nomor) | | | | NA | NA | NA | NA | 27 DTW | NA | NA | NA | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | Sosialisasi sadar wisata | | | | NA | NA | NA | 7 | 7 | NA | NA | NA | 6 | 4 | | | | | |
| 7 | Masa tinggal (length of stay) | | | | NA | NA | NA | 3 | 3 | NA | NA | NA | 2 | 2 | | | | | |
| 8 | Jumlah hotel dan penginapan | | | | NA | NA | NA | 350 | 350 | NA | NA | NA | 310 | 310 | | | | | |
| 9 | Jumlah kamar hotel dan penginapan | | | | NA | NA | NA | 4500 | 5000 | NA | NA | NA | 4500 | 4658 | | | | | |
| 10 | Jumlah event nasional di Provinsi | | | | NA | NA | NA | 4 | 4 | NA | NA | NA | - | 2 | | | | | |
| 11 | Jumlah Event internasional di Provinsi | | | | NA | NA | NA | 2 | 2 | NA | NA | NA | - | 2 | | | | | |

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Tahun 2012 – 2017

| No | Program / Kegiatan/Uraian | Anggaran Tahun 2012 – 2016 (d/m Jutaan) | | | | | Realisasi Tahun Anggaran 2012 – 2016 (d/m Jutaan) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2012 – 2016 (d/m Jutaan) | | | | |
|----|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 2 | 2013 3 | 2014 4 | 2015 5 | 2016 6 |
| | BELANJA DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | 5.916.889 | 6.642.990 | 5.407.978 | 6.280.626 | 7.591.692 | 5.405.185 | 6.089.329 | 5.154.852 | 5.993.714 | 7.108.348 | | | | | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 9.004.766 | 11.832.081 | 10.283.733 | 18.078.986 | 12.366.560 | 7.227.793 | 9.287.267 | 8.000.628 | 12.851.229 | 9559.595 | | | | | |
| | Belanja Modal | 1.313.773 | 538.767 | 731.540 | 608.952 | 613.000 | 1.121.111 | 446.435 | 361.865 | 568.373 | 590.856 | | | | | |

Sumber : Sub Bagian Keuangan Disbudpar

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sepanjang periode 2012-2016 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada Urusan Kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Provinsi. Pembangunan kesenian dan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun Tantangan Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
2. Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
3. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya / benda pusaka.
4. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
5. Kurangnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

Sedangkan peluang pada urusan Kebudayaan

1. Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan berkesinambungan.
2. Banyaknya pelaku seni dan komunitas senibudaya.
3. Banyaknya kreator dan apresiator Seni dan Budaya.
4. Banyaknya nilai-nilai peninggalan seni budaya yang harus dilestarikan.
5. Banyaknya seniman dan budayawan yang berprestasi baik di tingkat regional dan nasional.
5. Tersedianya tempat pertunjukan/pagelaran seni budaya.

Berdasarkan urusan Pariwisata maka terdapat tantangan yaitu :

- 1) Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;
- 2) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarpras, fasilitas umum dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi, parkir, toilet, mushola, penerangan umum dsb);
- 3) Belum maksimalnya pengembangan bandara internasional baru yang kapabilitasnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan services;
- 4) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat;
- 5) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
- 6) Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata;
- 7) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
- 8) Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
- 9) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.

- 10) Masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas Sumber Daya Pariwisata, pelaku ekonomi kreatif maupun kelembagaan kepariwisataan;
- 11) Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata di Daya Tarik Wisata dan penunjang kepariwisataan lainnya;
- 12) Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata;
- 13) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan;
- 14) Belum optimalnya hubungan kemitraan dunia pendidikan dengan stakeholder pariwisata.

Sedangkan melihat tantangan diatas, maka dapat dilihat peluang dalam urusan pariwisata sebagai berikut :

1. Kondisi aksesibilitas menuju daya tarik wisata yang semakin baik;
2. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk-produk semakin meningkat;
3. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
4. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhikebutuhan wisatawan;
5. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
6. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
7. Banyaknya event-event pariwisata.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Pembangunan kepariwisataan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan dijadikannya Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia, diharapkan jumlah wisatawan yang datang ke Bangka Belitung semakin meningkat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung merupakan salah satu pendorong kegiatan perekonomian masyarakat Bangka Belitung.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan tantangan dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan datang ke Bangka Belitung, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan bidang – bidang tugas, antara lain :

1. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;
 - b) Rendahnya kualitas jaringan aksesibilitas menuju lokasi daya tarik wisata;
 - c) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarpras dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi dsb);
 - d) Rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, mushola, penerangan umum, dll);
 - e) Belum optimalnya pengembangan dan penataan bandara internasional baru yang kapabelitasnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan services;

- f) Rendahnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholders swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata;
 - g) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat.
2. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
- a) Rendahnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - b) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
 - c) Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata;
 - d) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
 - e) Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
 - f) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.
3. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata
- a) Masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas Sumber Daya Pariwisata, pelaku ekonomi kreatif maupun kelembagaan kepariwisataan;
 - b) Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata di Daya Tarik Wisata dan penunjang kepariwisataan lainnya;
 - c) Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata;
 - d) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan;
 - e) Belum optimalnya hubungan kemitraan dunia pendidikan dengan stakeholder pariwisata.

4. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan

- a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
- b) Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
- c) Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya / benda pusaka.
- d) Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
- e) Kurangnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

Pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani melalui budaya daerah/nasional serta penguatan terhadap salah satu unggulan daerah yaitu pariwisata di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Aspek Kajian | Capaian / kondisi Saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan PD |
|---|--|---|---|---|---|
| | | | Internal | Eksternal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ASPEK PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | | | | | |
| Aspek Sumber Daya Manusia (tugas dan fungsi aparatur) | Masih terbatasnya Kompetensi SDM Disbudpar dalam melaksanakan tugas fungsi dan pelayanan publik | UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Perda No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pergub No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | <ul style="list-style-type: none"> Tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan tugas dan fungsi Kurang meratanya kemampuan dan keahlian pegawai | - | <ul style="list-style-type: none"> Disiplin dan tanggung jawab pegawai yang masih rendah Pendelegasian tugas dan wewenang tidak sesuai dengan bidang tugas. |
| Aspek Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> Bidang – bidang dalam melaksanakan tugas belum didukung oleh SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. | <ul style="list-style-type: none"> UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pergub No. 58 Tahun 2016 | Kebutuhan dan kualifikasi SDM belum terpenuhi | Formasi kebutuhan SDM belum difasilitasi OPD terkait. | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tugas dan fungsi PD harus mengacu kepada lebih |

| | | | | | |
|----------------|--|--|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan pariwisata | | | | <p>dari 1 K/L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih tugas dan fungsi dengan Perangkat Daerah lainnya • Pelayanan yang belum optimal • Kurangnya koordinasi antar stakeholder pariwisata dan kebudayaan |
| Aspek Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memenuhi standar prioritas dalam pengalokasian anggaran • Seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga menghambat penyerapan anggaran • Lambatnya pertanggungjawaban keuangan sehingga mempersulit pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • Pergub No. 58 Tahun 2016 | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis akrual dan kinerja • Kurangnya Kompetensi SDM • Proses pengajuan pertanggungjawaban kegiatan yang lambat | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Prosedur perencanaan yang rumit • Seringnya terjadi perubahan kebijakan/peraturan keuangan • Kurangnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tercapainya indikator sasaran dan target pada program / kegiatan di PD • Tidak tepatnya waktu pencapaian target kinerja PD • Pelayanan tidak optimal karena |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | | pemahaman pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa | lambatnya pertanggungjawaban kegiatan |
| Aspek Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan gedung kantor dalam memberikan pelayanan publik • Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik | Permenpan No 20/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal dan tersedianya kebutuhan ruang dan bangunan yang memadai • Belum terpenuhinya sarpras pendukung pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi APBD yang terbatas. • Regulasi penetapan status gedung kantor yang masih belum kuat | <ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan. • Terhambatnya pelaksanaan administrasi sehingga pelayanan tidak optimal. |
| ASPEK KAJIAN TERHADAP RENSTRA SKPD KAB/KOTA | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya antara Program dan Kegiatan yang ada di Provinsi dengan Kab/Kota sehingga belum sinerginya Renstra Kab/Kotadengan dengan Renstra Provinsi • Masih adanya Renstra Kab/kota tidak/belum disusunmengacu kepada RenstraProvinsi dan K/L | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25/2004 • UU No. 23 Tahun 2014 • Permendagri No. 54/2010 • Permendagri No. 13/2006 dan perubahannya | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM | Koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya fungsi PD provinsi sebagai koordinator dan perwakilan pemerintah pusat. • Rencana pembangunan tidak sinergi dan tidak |
| ASPEK KAJIAN TERHADAP RENSTRA | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya antara Program dan Kegiatan yang ada di Provinsi dengan K/L sehingga belum sinerginya | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25/2004 • UU No. 23 Tahun 2014 • Permendagri No. 54/2010 | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM | Kebijakan dan Koordinasi Pemerintah Pusat dengan | <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan tidak sinergi dan tidak |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| K/L | <p>Renstra K/L dengan dengan Renstra Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Struktur Organisasi PD Provinsi masih terdapat uraian tugas yang belum sesuai dengan Struktur Organisasi K/L sehingga sinkronisasi Program / Kegiatan mengalami kesulitan. | <ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No. 13/2006 dan perubahannya | | Provinsi | <p>berkelanjutan karena faktor ego daerah dan egosektoral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih sulitnya mencapai target dan sasaran pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan |
| ASPEK KAJIAN TERHADAP RTRW | <p>Masih banyaknya aktifitas perekonomian seperti penambangan timah inkonvensional, perkebunan sawit baik yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat tidak berpedoman kepada RTRW Provinsi dan RTRWKab/Kota sehingga menyebabkan banyaknya daya tarik wisata yang rusak padadestinasipariwisata maupun cagar budaya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • UU 23/2014 • UU No 10/2009 tentang Kepariwisata • UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya • PP 50/2011 tentang Ripparnas • PP 38/2007 • Perda No tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Perda NO 7 Tahun 2016 tentang Ripparprov | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah | Kewenangan Kabupaten / Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya Data Tarik Wisata yang rusak • Menurunnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata |
| ASPEK KAJIAN TERHADAP KLHS | <p>Banyak daya tarik wisata yang rusak akibat aktifitas penambangan dan pertanian/perkebunan hal</p> | <ul style="list-style-type: none"> • UU 23/2014 • UU No 10/2009 tentang Kepariwisata | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | tersebut dikarenakan belum optimalnya penerapan regulasi tentang kebijakan pemanfaatan kawasan | <ul style="list-style-type: none"> • UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya • PP 50/2011 tentang Ripparnas • PP 38/2007 • Perda No tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Perda NO 7 Tahun 2016 tentang Ripparprov | | | |
|--|--|---|--|--|--|

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam menjalankan tugas, seorang Kepala Daerah memiliki visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan yang disusun dan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022. Adapun Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi

juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 ditetapkan dalam 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adapun Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 adalah :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3.2.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi: Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi | | | | |
|---|--|--|--|--|
| No | Misi dan Program / Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan berdasarkan Pelayanan PD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi ke-1 Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah; Program/Sasaran : Pengembangan Pariwisata Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata; 2. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan 3. Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Pariwisata - Masih terbatasnya jumlah lembaga pariwisata - Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kerjasama dan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata, lembaga pariwisata dan koordinasi pemangku kepentingan pariwisata |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang dan rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas sarana prasarana dan fasilitas umum penunjang pariwisata 2. Rendahnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholders swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata | <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum di Daya Tarik Wisata - Masih rendahnya kesadaran dan komitmen Pelaku Wisata dan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Potensi daya tarik wisata yang beragam dan potensial - Ditetapkan Bangka Belitung dalam PP No.50/2011 sebagai Kawasan Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata 2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media | Masih kurangnya pemasaran pariwisata baik keluar negeri maupun dalam negeri | Potensi daya tarik wisata yang beragam dan potensial |
|--|--|---|---|--|

3.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam pelaksanaan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat tujuan dan sasaran dalam upaya mendukung misi tersebut, adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Misi I : Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

Tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Meningkatkan Daya saing Daerah Unggul dalam Inovasi Agrobahari
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

Sasaran:

1. Penurunan Tingkat Pengangguran
2. Penurunan Tingkat kemiskinan
3. Menekan Laju Inflasi
4. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
5. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
6. Perwujudan kemandirian energi dan mendorong penciptaan energi baru terbarukan
7. Peningkatan pembangunan berbasis industri
8. Peningkatan Produksi dan nilai tambah sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan
9. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan
10. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perkebunan
11. Peningkatan Pengembangan Pembangunan Pariwisata.

3.3. Telaah Renstra K/L dengan Renstra Provinsi

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi

kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

1. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota; dan
2. apakah tingkat capaian kinerja Renstra PD provinsi melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra PD provinsi melebihi sasaran Renstra K/L, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja PD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa PD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan PD yang akan ditangani pada Renstra PD provinsi periode berikutnya. Jika Renstra K/L rencana tahunan telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra PD kabupaten/kota;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik factor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Disbudpar | Faktor | |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan | | Penghambat | Pendorong |
| | Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman | <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya museum provinsi • Banyaknya cagar budaya yang terancam rusak • Belum optimalnya database cagar budaya • Belum ditetapkannya cagar budaya di provinsi/kab/kota menyebabkan sulitnya upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi anggaran • Belum adanya regulasi daerah tentang pelestarian cagar budaya daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan |
| | Pembinaan Kesenian dan Perfilman | <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya taman budaya dan pasar seni. • Masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal. • Masih terbatasnya ruang pertunjukkan film. | <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kreatifitas pelaku seni | <ul style="list-style-type: none"> • Banyak terdapat adatistiadat, tradisi dan kearifan lokal |
| | Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran lembaga kepercayaan di dalam masyarakat dalam penguatan ketahanan budaya lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya penganut kepercayaan yang tidak menempatkan diri pada lembaga kepercayaan yang ada | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Tim PAKEM (pengawasan aliran Kepercayaan masyarakat) |
| | Program Sejarah Dan Nilai Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya informasi dan publikasi terhadap nilai-nilai kesejarahan dan pemanfaatannya dalam | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>pengembangan ketahanan budaya dan pembangunan jatidiri dan karakter bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya media dan ruang apresiasi dalam mendukung peningkatan apresiasi nilai-nilai sejarah dan budaya nasional. | | |
| | Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya | <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kerjasama dengan para pelaku seni budaya dalam rangka mempromosikan kebudayaan daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masih terbatasnya kerjasama antara pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan daerah. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | Adanya dukungan moril dari pelaku seni budaya, akademisi dan masyarakat. |
| | Program Pelestarian Budaya | <ul style="list-style-type: none"> Belum adanya museum provinsi Banyaknya cagar budaya yang terancam rusak dan kurang terpelihara Belum optimalnyapemanfaatan database cagar budaya Masih kurangnya pertunjukan seni dan budaya daerah Masih terbatasnya media dan ruang apresiasi seni dan budaya Masih kurangnya lembaga seni dan budaya daerah | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | Besarnya minat dan keinginan pelaku seni dan budaya serta adat istiadat yang dilestarikan |
| | Misi 2: Memperluas keterjangkauan layanan | - | - | - |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | pendidikan | | | |
| | Misi 3: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan | - | - | - |
| | Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman | <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kondisi museum serta kualitas pengelolaan dan penyajian museum. Masih terbatasnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap museum dan koleksinya. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | Dukungan dana APBDkab/kota dan swasta. |
| | Pembinaan Kesenian dan Perfilman | <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional. Masih rendahnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap film-film yang bertemakan pendidikan dan film lokal Arus globalisasi dan menguatnya pengaruh budaya pop luar negeri terhadap apresiasi masyarakat terhadap kesenian. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi. |
| | Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi | <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran dan toleransi akan keberagaman budaya dan kepercayaan. Terbatasnya dukungan dana APBD provinsi maupun APBN Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi. |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya solidaritas dan sportivitas dan kegotongroyongan dikalangan masyarakat. • Masih terbatasnya pengetahuan mengenai pengetahuan tradisional dan folklor. | | |
| | Program Sejarah Dan Nilai Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya. • Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap tradisi lokal. • Masih terbatasnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya nasional. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi. |
| | Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pemahaman dan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. • Rendahnya kuantitas dan kualitas diplomasi dan hubungan kerjasama dibidang kebudayaan. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | - |
| | Misi 4 : Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan | | | |
| | Misi 5 : Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan layanan pendidikan | | | |
| | Misi 6: Melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia | | | |
| | Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman | <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya usaha pendokumentasian cagar | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | - |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM untuk dokumentasi cagar budaya. • Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan permuseuman baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. | | |
| | Pembinaan Kesenian dan Perfilman | <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya database kesenian tradisional. • Masih terbatasnya perlindungan terhadap kesenian tradisional. • Terbatasnya SDM dibidang perfilman. • Terbatasnya database perfilman. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | - |
| | Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi | Masih terbatasnya penggalian dan kajian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | - |
| | Program Sejarah Dan Nilai Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya kajian sejarah dan nilai budaya daerah. • Masih rendahnya internalisasi sejarah dan nilai budaya. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | - |
| | Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya | Masih terbatasnya SDM kebudayaan dibidang diplomasi budaya. | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | - |
| | Program Pelestarian Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pendokumentasian cagar budaya daerah • Masih terbatasnya database kesenian tradisional • Masih kurangnya kajian seni tradisi, sejarah dan nilai budaya • Masih kurangnya pertunjukan seni dan budaya daerah | Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN | Besarnya minat dan keinginan pelaku seni dan budaya serta adat istiadat yang dilestarikan |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya lembaga seni, adat dan budaya daerah | | |
| Kementerian Pariwisata Misi 1: Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah | | | | |
| T1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia | | | | |
| S1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional | - | | Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB tidak dijadikan indikator capaian kinerja Perangkat Daerah | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |
| S2. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional | Belum terbangunnya data ketenagakerjaan sektor pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid | | Kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja disektor pariwisata tidak dijadikan indikator capaian kinerja Perangkat Daerah | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |
| S3. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata | Belum terbangunnya data investasi pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid | | Investasi sektor pariwisata belum dijadikan indikator capaian kinerja perangkat daerah | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |
| S4. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia | data primer sulit diperoleh | | Belum optimalnya pengembangan bandara internasional H.AS Hanandjoeddin | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |
| S5. Meningkatnya kuantitas wisman ke Indonesia dan wisnus | <ul style="list-style-type: none"> masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acilliary dan atraksi pariwisata di daerah | | <ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya koordinasi antar daerah Terbatasnya anggaran dalam rangka pemasaran / promosi pariwisata Masih adanya ego sektoral daerah | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |
| T2. Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia | | | | |
| S6. Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia | Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acilliary dan atraksi pariwisata di daerah | | <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum pendukung pariwisata Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | S7. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah • Belum adanya bidang destinasi dalam struktur organisasi SKPD Budpar | <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum pendukung pariwisata • Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata • Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |
| | S8. Terciptanya pemasaran dan promosi pariwisata yang berkualitas dan bertanggungjawab | <ul style="list-style-type: none"> • Pangsa pasar belum terbentuk sehingga promosi belum dilakukan fokus pada pangsa pasar • Pemasaran belum fokus pada upaya meningkatkan dampak pada peningkatan | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata • Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata | Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022 |

3.4 Telaah Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten / Kota

Berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pariwisata sebagai acuan untuk bidang pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, arah rencana strategis pengembangan pariwisata Indonesia secara umum berusaha untuk melakukan penguatan dan diverifikasi pada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia dengan harapan hal ini mampu mewujudkan produk unggulan pariwisata di masing-masing daerah. Cara untuk mewujudkan arah pembangunan strategis itu dilakukan dengan mendorong seluruh warga masyarakat Indonesia untuk turut andil dalam menciptakan ekonomi kreatif yang memiliki daya saing dan ciri khas sehingga mampu menjadi ikon-ikon baru pariwisata Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang membawahi urusan budaya, berfokus pada pelestarian terhadap kebudayaan Indonesia dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan sistem informasi kebudayaan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelestarian budaya, penyediaan dana serta penguatan tata kelola yang artinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolanya.

Sedangkan rencana strategis pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan oleh provinsi, berfokus pada pelestarian kebudayaan dan kesenian menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam proses pengembangan bidang pariwisata. Karena seharusnya kebudayaan dan kesenian ini mampu menjadi aset yang akan memberikan keuntungan dalam pengembangan pariwisata serta lebih meningkatkan cara-cara promosi kebudayaan dan pariwisata yang kreatif baik media maupun sumber daya manusia pelaksanaannya.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten / Kota

| No | Tujuan Renstra Kab/Kota | Sasaran Renstra Kab/Kota | Permasalahan Pelayanan Disbudpar | Faktor Penghambat |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang | | | |
| | Misi 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta pemanfaatan sarana dan prasarana kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga untuk mendukung investasi. | | | |
| | Peningkatan kualitas pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| | Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah | | |
| | Misi 2 : Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang pariwisata dalam mengembangkan produk-produk pariwisata untuk melaksanakan promosi, pemasaran dan pengembangan pariwisata. | | | |
| | Kepariwisata Kota Pangkalpinang yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang • Berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kota Pangkalpinang | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| | Misi 3 : Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga serta mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang kepemudaan dan olahraga. | | | |
| | Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan di bidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | |
| 2. | Dinas Pariwisata, Seni dan Olahraga Kabupaten Bangka | | | |
| | Misi 1: Pemanfaatan potensi pariwisata yang dapat meningkatkan perandalam kesejahteraan masyarakatserta mampu meningkatkan pendapatandaerah. | | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumenperencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran | |
| | Misi 2: Pengembangan kawasan wisata untuk mendukung pemerataanpembangunan di seluruh wilayah kabupaten Bangka sesuai denganpotensi masing - masing wilayah. | | | |
| | Misi 3: Mengembangkan produk - produk pariwisata secara seksama agar tetap terjaga otentitasnya (keasliannya), berbasisnya karakteristik lokal danberbasis masyarakat dengan tetap berorientasi kepada pasar. | | | |
| | Misi 4: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembanganpariwisata. | | | |
| | Misi 5: Menggali, menjaga, mengembangkan dan melestrikan kekayaanAdat | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Istiadat, Budaya dan lingkungan | | | |
| | Misi 6: Mengembangkan kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang pariwisata agar dapat mewujudkan Kabupaten Bangka Sebagai destinasi pariwisata yang terkemuka. | | | |
| | Misi 7: Meyadarkan masyarakat serta sekolah pelaku pariwisata bahwasaling-masing pihak memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan Pariwisata. | | | |
| | Misi 8: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan Kebudayaan agar upayamemanfaatkan. | | | |
| | Misi 9: Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku Pariwisata pada khususnya bahwa pariwisata dapat mengantarkan kondisi yang lebih baik pada aspek Kamtibmas, pengamalan ajaran dan pancasila serta mewujudkan otonomi daerah dengan melaksanakan pendidikan kesehatan serta aksesibilitas | | | |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|---|
| | sebagai pendorong dan penggerak pembangunan. | | | |
| | Misi 10: Mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembagayang bergerak dibidang pariwisata dalam negeri maupun dari luar negeri. | | | |
| | Misi 11: Mengembangkan kerjasama daerah dengan lain untuk melaksanakan promosi dan pengembangan pariwisata | | | |
| 3. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat | | | |
| | Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi | Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| | | Berkembangnya destinasi wisata | | |
| 4. | Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bangka Tengah | | | |
| | | | | |
| 5. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan | | | |
| | Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| | Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang optimal di bidang Pariwisata, | Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | Kepemudaan dan Olahraga agar pembinaan berorientasi pada prestasi kerja dan daya saing | | antara provinsi dan kab/kota | |
| | Meningkatnya upaya pelestarian dan penggalian nilai-nilai seni, budaya Lokal dan sejarah tradisional agar apresiasi masyarakat terhadap kearifan budaya lokal terwujud dan menumbuhkan ekonomi kreatif | Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan local dengan bertumbuhnya Ekonomi Kreatif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat | | |
| | Meningkatnya produk dan prestasi di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata agar berkembang kepariwisataan di Kabupaten Bangka Selatan | Berkembangnya kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan | | |
| 6. | Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung | | | |
| | Misi ke-1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata | | | |
| | Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD yang akuntabel | Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | | |
| | Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional | Meningkatnya tata kelola aparatur | | |
| | Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan | Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah | | |
| | Misi ke-2: Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan meningkatkan pemasaran pariwisata | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | Mewujudkan kepariwisataan daerah yang handal | Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| | Misi ke-3: Meningkatkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | | | |
| | Mewujudkan pengelolaan sumber daya ekonomi kreatif untuk pengembangan pariwisata daerah | Terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| 7. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur | | | |
| | Misi 1: Mengembangkan sumber daya manusia baik aparatur, pelaku wisata, pelaku usaha budaya dan pariwisata yang profesional, kreatif dan berinovasi secara terpadu dan berkelanjutan. | | <ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran |
| | Misi 2: Penggalan dan pengembangan potensi-potensi budaya dan pariwisata serta sumber daya alam yang ada secara terpadu dan berkelanjutan | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana budaya dan pariwisata daerah. | | | |
| | Misi 4: Melaksanakan promosi Pariwisata Daerah ketingkat Nasional danInternasional yang mendukung pembangunan ekonomi daerah dandukungan terhadap industri. | | | |

Tabel 3.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

| No | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi | Sasaran pada Renstra PD kabupaten/Kota*) | Sasaran pada Renstra K/L |
|-----|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata | 69.52% | Sesuai | Sesuai |
| 2 | Persentase sarana prasarana di Destinasi Pariwisata yang memenuhi | 100.00% | Sesuai | Sesuai |
| 3 | Persentase kunjungan wisatawan | 553,752 | Sesuai | Sesuai |
| | | 10,554 | Sesuai | Sesuai |
| 4 | Persentase sumber daya pariwisata yang berkualitas | 11.66% | Sesuai | Sesuai |
| | Persentase kelembagaan Kepariwisataan yang berkualitas | 100.00% | Sesuai | Sesuai |

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik factor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
7. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- 1) Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- 2) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan dalam konteks **“Clean Governance”** yang **pro-poor, progrowth dan pro-job**, serta **pro - enviro**ntment sebagai triple track yang menganut 8 prinsip dasar dalam pelayanan public yaitu:

- (1) asas kepastian hukum;
- (2) keseimbangan;
- (3) ketidakberpihakan;
- (4) kecermatan;
- (5) tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kewenangan;
- (6) keterbukaan;
- (7) profesionalitas;
- (8) kepentingan umum.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata dan budaya akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dijelaskan bahwa isu-isu strategis mengenai permasalahan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung, khusus urusan kebudayaan dan pariwisata antaralain:

- 1) Masih terbatasnya kualitas serta kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
- 3) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
- 4) Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata;
- 5) Belum optimalnya pelestarian budaya lokal yang diarahkan pada pembangunan sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa;
- 6) masih lemahnya kualitas dan kapasitas, pengembangan dan inovasi, promosi dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan serta kemampuan tata kelola dalam pelestarian kebudayaan;

- 7) Masih lemahnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya budaya yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi, rendahnya pengembangan kreasi dan produksi industri budaya, lemahnya institusi budaya, lemahnya institusi dan pranata yang kondusif, serta lemahnya akses dan manajemen permodalan dalam rangka pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal.

Sedangkan isu - isu strategis di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain:

1. Urusan Kebudayaan

Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, hal tersebut dikarenakan masih perlunya dikembangkan budaya lokal seperti atraksi seni dan budaya. Sehingga isu strategis bidang kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
2. Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
3. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
4. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

2. Urusan Pariwisata

Berdasarkan identifikasi permasalahan pariwisata maka isu-isu strategis urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya Infrastruktur, sarana, prasarana dan peran serta pemangku kepentingan pariwisata daerah.
- b. Belum optimalnya pemasaran pariwisata yang terintegrasi.
- c. Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Pariwisata.

Tabel 3.5

Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

| No | Kriteria*) | Bobot**) |
|----|--|----------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kab/Kota | 20 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggungjawab PD | 10 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik | 20 |
| 4 | Memilik daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |
| 5 | Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani | 15 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 25 |
| | | 100 |

Tabel 3.6
 Nilai Skala Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
 Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria ke- | | | | | | | Total Skor |
|----|---|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dst | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Belum optimalnya pemasaran pariwisata yang terintegrasi | | | | | | | | |
| 1. | Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 60 |
| 2. | Rendahnya kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | - | - | 75 |
| | Belum optimalnya Infrastruktur, sarana, prasarana dan peran serta pemangku kepentingan pariwisata daerah. | | | | | | | | |
| 3. | Kurangnya kualitas dan kuantitassarana prasarana dan fasilitas umum di destinasi pariwisata | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | - | 100 |
| | Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Pariwisata | | | | | | | | |
| 4. | Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | - | 100 |
| 5. | Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 60 |
| | Belum optimalnya pelestarian budaya lokal. | | | | | | | | |
| 6. | Kurangnya kualitas SDM Kebudayaan | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | - | - | 75 |
| 7. | Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 60 |

Guna menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rata – Rata Skor Isu-isu Strategis
Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Isu Strategis | Total Skor | Rata – Rata Skor |
|----|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan | 60 | |
| 2. | Rendahnya kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata | 75 | |
| 3. | Kurangnya kualitas dan kuantitassarana prasarana dan fasilitas umum di destinasi pariwisata | 100 | |
| 4. | Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata | 100 | |
| 5. | Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata | 60 | |
| 6. | Kurangnya kualitas SDM Kebudayaan | 75 | |
| 7. | Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya | 60 | |

Mengacu kepada isu-isu strategis tersebut, maka dalam upaya melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait isu-isu strategis tersebut aparatur Disbudpar harus berkemampuan tinggi dan profesional, terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap mendukung dan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berpedoman pada Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi Misi ke-1 pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang diperlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangkawaktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan denganberpedoman pada isu-isu strategis.Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searahdengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yangakan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Tujuan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan adalah **MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN BERBASIS BUDAYA LOKAL.**

4.1.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Oleh karena itu, memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu:

1. Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar.
3. Meningkatnya kunjungan pariwisata.
4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas.
5. Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja pada tahun ke- | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|---|--|---------|---------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1. | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berbasis budaya lokal | Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata | Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata | 17.29% | 29.37% | 42.38% | 55.39% | 69.52% | |
| 2. | | Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar | Persentase sarana prasarana di Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar | 18.52% | 44.44% | 70.37% | 96.30% | 100.00% | |
| 3. | | Meningkatnya kunjungan pariwisata | Meningkatnya kunjungan pariwisata | Persentase kunjungan wisatawan | 392,292 | 427,598 | 466,082 | 508,030 | 553,752 |
| | | | | | 7,758 | 8,378 | 9,049 | 9,772 | 10,554 |
| 4. | | Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas | Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas | Persentase sumber daya pariwisata yang berkualitas | 4.29% | 8.44% | 10.46% | 11.16% | 11.66% |
| | | | | | Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas | Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas | Persentase kelembagaan Kepariwisataan yang berkualitas | 83.33% | 91.67% |

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022

5.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.2.1 Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan analisa akar Masalah, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan uji kompetensi bagi sumber daya pariwisata.
2. Peningkatan kualitas daya tarik wisata, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
3. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata
4. Peningkatan pelestarian budaya lokal

1.2.2 Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengambil strategi dan memunculkan kebijakan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada organisasi untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran organisasi, maka kebijakan yang akan diambil yaitu:

1. Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya.
2. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata terintegrasi.
3. Peningkatan kuantitas Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan professional.
4. Peningkatan infrastruktur , sarana dan prasarana pengembangan destinasi pariwisata.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|-----------|---|---|--|---|
| 1. | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berbasis budaya lokal | Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata | Peningkatan pelestarian budaya lokal | Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya |
| 2. | | Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar | Peningkatan kualitas daya tarik wisata, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata | Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi pariwisata |
| 3. | | Meningkatnya kunjungan pariwisata | Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata | Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata terintegrasi |
| 4. | | Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas | Pengembangan uji kompetensi bagi sumber daya pariwisata | Peningkatan kuantitas Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan profesional |

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. Program Pelestarian Budaya
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata.
5. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

5.2 KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Program Pelestarian Budaya Daerah

1. Kegiatan Kajian Tradisi Bangka Belitung
2. Kegiatan Penulisan Sejarah Bangka Belitung
3. Kegiatan Pengembangan Data Pokok Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung

4. Kegiatan Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung
5. Kegiatan Partisipasi dan Penghargaan Serta Kerjasama Di Bidang Budaya
6. Kegiatan Pelatihan Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung
7. Kegiatan Pagelaran Pameran Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung
8. Kegiatan Seminar Revitalisasi Dan Reaktualisasi Sejarah Dan Tradisi Bangka Belitung
9. Kegiatan Gita Bahana Dan Aubade Kemerdekaan RI
10. Kegiatan Lawatan Sejarah Dan Kemah Budaya
11. Kegiatan Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Cagar Budaya Dan Museum Daerah
12. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya
13. Kegiatan Pendokumentasian dan Publikasi Koleksi Museum Daerah
14. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolaan Cagar Budaya Dan Permuseuman
15. Kegiatan Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung
16. Kegiatan Perintisan Museum Provinsi
17. Kegiatan Kajian Cagar Budaya Bangka Belitung
18. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah
19. Kegiatan Pengiriman Misi Kesenian Daerah
20. Kegiatan Pelaksanaan Workshop Kesenian Daerah
21. Kegiatan Pentas Seni Budaya
22. Kegiatan Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai
23. Kegiatan Bantuan Sarana Dan Prasarana Sanggar Seni Tradisional
24. Kegiatan Pelaksanaan Dialog Budaya
25. Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Lagu Daerah
26. Kegiatan Pengembangan Seni Kriya Tradisional

27. Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Seni Tradisi (Perekaman Digitalisasi & Penulisan Naskah)
28. Kegiatan Festival Budaya Melayu

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung
2. Kegiatan Pelayanan Informasi Pariwisata
3. Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung
4. Kegiatan Pembuatan Bahan Publikasi
5. Kegiatan Publikasi Pariwisata
6. Kegiatan Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung
7. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
8. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung
9. Kegiatan Partisipasi Event Promosi Pariwisata
10. Kegiatan Pelaksanaan Fam Trip
11. Kegiatan Pelaksanaan Tour de Babel
12. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media
13. Kegiatan Roadshow Stakeholder Pariwisata
14. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri
15. Kegiatan Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung
16. Kegiatan Babel Tourism Run
17. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Geowisata
18. Kegiatan Pengembangan Promosi Wisata Edukatif, Kreatif dan Minat Khusus Bahari
19. Kegiatan Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus
20. Kegiatan Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah
21. Kegiatan Penyusunan Buku Pariwisata Daerah

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung
2. Kegiatan Pengembangan kawasan pariwisata provinsi

3. Kegiatan Penyusunan paket wisata
4. Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata
5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat
6. Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya
7. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
8. Kegiatan Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata
9. Kegiatan Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung
10. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK
11. Kegiatan Sosialisasi Paket Wisata Geowisata di Pulau Belitung
12. Kegiatan Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung
13. Kegiatan Penyusunan Interpretasi Berbasis Ekowisata Bahari di Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Belitung

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan

1. Kegiatan Pengembangan Industri Perfilman, Animasi, Video dan Fotografi
2. Kegiatan Pengembangan Seni Rupa dan Seni Kriya
3. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Kepariwisataan
4. Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata
5. Kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi bagi Sumber daya pariwisata
6. Kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi lanjutan bagi Sumber Daya Pariwisata

7. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Sistem Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata dengan Asosiasi Profesi dan LSP
8. Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan putra - putri kepariwisataan provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kegiatan Penyelenggaraan Lokakarya Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Pariwisata
10. Kegiatan Penerapan Sistem Magang berbasis kompetensi bagi pelajar sektor kepariwisataan
11. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil sertifikasi bagi sumber daya pariwisata
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Kuliner
13. Kegiatan Pengembangan Industri Perfilman, animasi , Video dan fotografi
14. Kegiatan Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
15. Kegiatan Pengembangan Seni Rupa dan Seni Kriya
16. Kegiatan Pengembangan Ekonomi kreatif berbasis media, aplikasi dan pengembangan permainan
17. Kegiatan Pengembangan Desain dan Arsitektur
18. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sentra Inovasi dan Pusat Kreatif
19. Kegiatan Pengembangan Cenderamata khas Kepulauan Bangka Belitung
20. Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas pengelolaan kelembagaan kepariwisataan
21. Kegiatan Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah
22. Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan daerah
23. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Lintas Sektor Pariwisata
24. Kegiatan Kajian Peran Kelembagaan Pelaku Pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan

25. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan kepariwisataan
26. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif
27. Kegiatan Partisipasi Event Festival Nusantara

5. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- a) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang
- b) Kegiatan Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung

5.3. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan selama periode waktu 2017-2022 dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan di Kepulauan Bangka Belitung. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017-2022. Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Budaya Daerah

Indikator : Persentase budaya Lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina.

Sedangkan kegiatan dapat dilihat dalam deskripsi singkat dibawah ini :

- a) Kegiatan Kajian Tradisi Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah naskah kajian tradisi

- Jumlah kebijakan pengelolaan budaya lokal yang disusun
- Kelompok Sasaran : Komunitas Budaya, Desa Adat, Stakeholder Kebudayaan

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b) Kegiatan Gita Bahana Dan Aubade Kemerdekaan RI

Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta gita bahana dan aubade
- Jumlah event budaya dan fasilitasi event daerah, dan nasional

Kelompok Sasaran : Pelajar/Mahasiswa

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c) Kegiatan Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Cagar Budaya Dan Museum Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah sarana dan prasarana cagar budaya dan museum daerah
- Tertatanya pengembangan kawasan cagar budaya dan museum
- Jumlah koleksi dan naskah kuno yang dikelola (Koleksi)

Kelompok Sasaran : SDM Kebudayaan, Pengelola Museum, Wisatawan/Pelajar/masyarakat umum dan Swasta serta Stakeholder kebudayaan

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya

Indikator Kinerja :

- Jumlah Cagar Budaya yang dikelola (Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya)
- Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan
- Jumlah pengelolaan terpadu cagar budaya.
- Jumlah BCB/Situs/Kawasan yang diinventaris dan ditetapkan.

- Jumlah cagar budaya daerah yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan nasional.
- Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya

Kelompok Sasaran : Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten /Kota, Pemerintah Kabupaten / Kota, SDM Kebudayaan dan Stakeholder Kebudayaan.

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- e) Kegiatan Seminar Revitalisasi Dan Reaktualisasi Sejarah Dan Tradisi Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta yang memahami budaya daerah
- Jumlah seminar/workshop revitalisasi budaya daerah
- Jumlah seminar/workshop reaktualisasi budaya daerah

Kelompok Sasaran : Stakeholder Kebudayaan

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- f) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba dan pawai (kali) (pertunjukan, pameran seni, festival, lomba, pawai budaya sanggar/organisasi)

Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum, Komunitas Budaya, Pelaku Seni dan Budaya serta Pemerintah

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- g) Kegiatan Pengiriman Misi Kesenian Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba dan pawai (kali) (pertunjukan, pameran seni, festival, lomba, pawai budayasanggar/organisasi)
- Jumlah event budaya yang diselenggarakan

Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum, Komunitas Budaya, Sanggar seni, Pelaku Seni dan Budaya serta Pemerintah

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator : Persentase Tingkat Kunjungan Wisatawan

Untuk Kegiatan dapat dideskripsikan seperti dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata daerah di media cetak (media)
- Jumlah publikasi dan pencitraan di media elektronik dan digital (media)
- Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata pariwisata daerah di media ruang (media)
- Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (ribu eksemplar) (Master, Leaflet, Booklet)
- Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (ribu keping) (Master, Keping)
- Jumlah peningkatan kerjasama dan kemitraan pencitraan pariwisata (naskah)

Kelompok Sasaran : Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Indikator Kinerja :

- Jumlah direct promotion di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (kegiatan)
- Jumlah partisipasi pada even pariwisata berskala nasional (kegiatan)
- Jumlah pendukung even seni, budaya dan pariwisata daerah (kegiatan)
- Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah dipasar dalam negeri (transaksi)

- Aktivasi Pusat Informasi Kepariwisata (Tourism Information Centre) (unit) dan Anjungan Informasi mandiri (AIM)
- Jumlah penyelenggaraan even pariwisata daerah (unit)

Kelompok Sasaran :

1. Calon Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
2. Biro Perjalanan Wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c) Kegiatan Publikasi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah promotion di media – media (kegiatan)
- Jumlah partisipasi pada even pariwisata berskala lokal, nasional dan internasional (kegiatan)

Kelompok Sasaran :

- a. Calon Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Biro Perjalanan Wisata
- c. Media Cetak dan Elektronik

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d) Kegiatan Dukungan Event Promosi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah dukungan event pariwisata (kegiatan)
- Jumlah partisipasi pada even pariwisata berskala lokal, nasional dan internasional (kegiatan)

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d. Kegiatan Pelaksanaan Fam Trip

Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta Familiarization Trip (Widyawisata Pengenalan) (peserta)
- Jumlah newsletter pariwisata Bangka Belitung (eksemplar)
- Jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata (naskah) (VITO)
- Jumlah pengembangan informasi pasar dalam daerah (naskah)
- Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri (naskah)

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Indikator : Presentase objek wisata yang terkelola

- a) Kegiatan Fasilitas sarana pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah dan lokasi wisata alam dan bahari
- Jumlah wisata budaya yang dikembangkan

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata
- d. Pengelola objek wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b) Kegiatan Pengembangan kawasan pariwisata provinsi

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitas pengembangan daya tarik wisata
- Jumlah daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata Provinsi

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata
- d. Pengelola daya tarik wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata (orang)
- Jumlah Pokdarwis
- Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan (orang)

Kelompok Sasaran :

1. Masyarakat disekitar Destinasi Pariwisata
2. Pelajar/mahasiswa
3. Stekholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d) Kegiatan Penyusunan paket wisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen paket wisata perjalanan
- Jumlah Jenis dan Paket Wisata Unggulan yang dikembangkan

Kelompok Sasaran :

1. Pelaku Wisata
2. SDM Pariwisata
3. Pemerintah Kab/Kota
4. Stekholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata
- Jumlah daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata Provinsi

Kelompok Sasaran :

1. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
2. Pemerintah Kabupaten / Kota
3. Stakeholder Pariwisata
4. Pengelola daya tarik wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- f) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Rencana Detail Kawasan Strategis Muntok dan sekitarnya

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen Rencana Induk Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata
- Jumlah daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan

Kelompok Sasaran :

1. Pemerintah Kabupaten / Kota
2. Stakeholder Pariwisata
3. Pengelola daya tarik wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata

Indikator :

1. persentase sumber daya pariwisata yang dilatih dan disertifikasi
2. Presentase pelaku industri ekonomi kreatif yang terlatih
3. Pertumbuhan lembaga pariwisata yang difasilitasi

Sedangkan penjabaran kegiatan dapat dilihat dalam deskripsi dibawah ini :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dilatih

Kelompok Sasaran :

1. Stakeholder Pariwisata
2. Kelompok usaha pariwisata dan budaya
3. Masyarakat / Pelajar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b) Kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi bagi Sumber daya pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang diuji kompetensi

Kelompok Sasaran :

1. Stakeholder Pariwisata
2. Kelompok usaha pariwisata dan budaya
3. Masyarakat / Pelajar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c) Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan putra - putri kepariwisataan provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah Putra Putri Pariwisata yang mengikuti event nasional dan internasional

Kelompok Sasaran :

1. Masyarakat / Pelajar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- d) Kegiatan Kerjasama pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya pariwisata dengan asosiasi profesi dan LSP

Indikator Kinerja :

- Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan Pariwisata

Kelompok Sasaran :

1. Lembaga Kepariwisata
2. Pelaku Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- e) Kegiatan Pengembangan Industri Perfilman, animasi , Video dan fotografi

Indikator Kinerja :

- Jumlah pelaku ekonomi kreatif
- Jumlah pengembangan ruang kreatif

Kelompok Sasaran :

1. Pelaku ekonomi kreatif
2. Stakeholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Indikator :

1. Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan
2. Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan indikator kegiatan dapat dideskripsikan dibawah ini :

- a) Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja :

- Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja :

- Jumlah Dokumen perencanaan anggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja :

- Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata (KEK Tanjung Kelayang

Indikator Kinerja :

- Jumlah pelaporan dan evaluasi yang disusun

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Tahun Awal 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Total Akhir |
|----------|--|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | Target Kegiatan (Output) | Pagu Anggaran | Target Kegiatan (Output) | Pagu Anggaran | Target Kegiatan (Output) | Pagu Anggaran | Target Kegiatan (Output) | Pagu Anggaran | Target Kegiatan (Output) | Pagu Anggaran | Target Kegiatan (Output) | Pagu Anggaran | 2018 - 2022 |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | | 2,125,758,500 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 12 bulan | 24,600,000 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 12 bulan | 205,989,963 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | | 4 kend | 236,480,000 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | 12 bulan | 124,930,000 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | 12 bulan | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor | | 12 bulan | 92,800,000 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 12 bulan | 59,781,500 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 12 bulan | 55,000,000 | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 12 bulan | 15,940,000 | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 12 bulan | 5,700,000 | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | | 12 bulan | 117,200,000 | | | | | | | | | | |
| | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | 12 bulan | 419,766,037 | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 14 orang | 400,490,000 | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah | | 7 kab/kota | 200,000,000 | | | | | | | | | | |
| | Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 1 kawasan | 137,081,000 | | | | | | | | | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan | Meningkatnya sarana | | 398,641,000 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Prasarana Aparatur dan prasarna aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | 3 pkt (WT, Fingerprint, dan Printer) | 105,071,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | 2671 m2 | 216,270,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | 12 bulan | 77,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan kualitas kerja pegawai | | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | | 14 stel | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 100,888,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS | | 10 orang | 100,888,000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan | | 240,615,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 3 dokumen | 182,265,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | | 5 dokumen | 58,350,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | Program Pengembangan Nilai Budaya | Persentase budaya lokal yang dilestarikan | | 4,610,678,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | | 10 event | 1,437,040,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan | | 35 orang | 143,898,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | peningkatan pelestarian tradisi | | 5 dokumen | 353,011,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian) | | 24 event | 1,053,546,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | pembinaan kesenian dan perfilman | | 1 festival | 640,911,000 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | pendukung pengembang an keragaman budaya | | 122 pentas | 982,272,5 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| V II | Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata | Persent ase tingkat kunjun gan wisawat an | | 4,166,89 0,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata bangka belitung dan sumatera</i> | | 2 websit e | 142,465,0 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri</i> | | 4 event | 600,092,0 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri)Dukungan Event Promosi)</i> | | 9 event | 1,438,305 ,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Pengembang an Pasar Pariwisata (Farm Trip)</i> | | 10 tour operat or, pers tour, photog rafer & jurnali s | 277,257,2 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Pengembang an Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)</i> | | 2 TIC | 370,446,0 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan</i> | | 6 media | 638,325,0 00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|----------------------|--|
| | Bangka Belitung (Bahan Promosi) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan TIC Mobile di Pulau Bangka dan Belitung (2 Unit) | 2 unit | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi Aplikasi Promosi Pariwisata | 1 kegiatan | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase tingkat kunjungan wisatawan | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung | | | 6 | 485,899,000 | 6 | 716,600,000 | 6 | 788,200,000 | 6 | 867,000,000 | 6 | 953,795,000 | 3,977,050,000 | |
| | Pelayanan Informasi Pariwisata | | | 4 | 120,990,000 | 4 | 133,661,000 | 4 | 140,344,000 | 4 | 147,362,000 | 4 | 154,700,000 | 703,364,000 | |
| | Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung | | | 2 | 118,920,000 | 2 | 200,000,000 | 2 | 210,000,000 | 2 | 230,000,000 | 2 | 240,000,000 | 1,147,012,000 | |
| | Pembuatan Bahan Publikasi | | | 0 | - | 1 | 56,700,000 | 1 | 59,535,000 | 1 | 62,511,000 | 1 | 65,637,000 | 244,383,000 | |
| | Publikasi Pariwisata | | | 0 | - | 5 | 250,000,000 | 5 | 300,000,000 | 5 | 350,000,000 | 5 | 400,000,000 | 1,300,000,000 | |
| | Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung | | | 0 | - | 1 | 149,112,000 | 1 | 156,568,000 | 1 | 164,396,000 | 1 | 172,616,000 | 784,704,000 | |
| | Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam Negeri | | | 4 | 245,630,000 | 4 | 260,947,000 | 4 | 273,994,000 | 4 | 287,694,000 | 4 | 302,000,000 | 1,373,156,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|
| | Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung | | | | 0 | - | 1 | 75,000,000 | 1 | 82,500,000 | 1 | 90,750,000 | 1 | 99,825,000 | 348,075,000 |
| | Dukungan Event Promosi Pariwisata | | | | 15 | 2,436,415,000 | 50 | 5,503,725,000 | 50 | 5,778,911,000 | 50 | 6,067,800,000 | 50 | 6,371,200,000 | 28,876,312,000 |
| | Pelaksanaan Fam Trip | | | | 0 | - | 1 | 223,668,000 | 1 | 234,852,000 | 1 | 246,594,000 | 1 | 258,924,000 | 1,177,056,000 |
| | Pelaksanaan Tour d' Bangka Belitung Island | | | | 0 | - | 1 | 945,000,000 | 1 | 992,250,000 | 1 | 1,041,800,000 | 1 | 1,093,900,000 | 4,972,950,000 |
| | Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui Media | | | | 5 | 286,670,000 | 5 | 486,143,000 | 5 | 510,450,000 | 5 | 535,900,000 | 5 | 562,700,000 | 2,558,187,000 |
| | Roadshow Stakeholder Pariwisata | | | | 0 | - | 5 | 583,000,000 | 5 | 641,300,000 | 5 | 705,430,000 | 5 | 775,973,000 | 2,705,703,000 |
| | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri | | | | 0 | - | 2 | 600,000,000 | 2 | 660,000,000 | 2 | 726,000,000 | 2 | 733,000,000 | 2,719,000,000 |
| | Penyusunan Profil Pasar Pariwisata Bangka Belitung | | | | 0 | - | 1 | 288,750,000 | 1 | 303,187,000 | 1 | 313,346,000 | 1 | 334,264,000 | 1,239,547,000 |
| | Babel Tourism Run | | | | 0 | - | 1 | 735,000,000 | 1 | 771,750,000 | 1 | 810,337,000 | 1 | 850,854,000 | 3,867,941,000 |
| | Pelaksanaan Promosi Geowisata | | | | 0 | - | 1 | 288,750,000 | 1 | 303,187,000 | 1 | 313,346,000 | 1 | 334,264,000 | 1,239,547,000 |
| | Pengembangan Promosi Wisata Edukatif, Kreatif, dan Minat Khusus Bahari | | | | 0 | - | 1 | 288,750,000 | 1 | 303,187,000 | 1 | 313,346,000 | 1 | 334,264,000 | 1,239,547,000 |
| | Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus | | | | 0 | - | 1 | 288,750,000 | 1 | 303,187,000 | 1 | 313,346,000 | 1 | 334,264,000 | 1,239,547,000 |
| | Penyusunan | | | | 225 | 147,252,000 | 250 | 222,373,000 | 275 | 2,446,111,000 | 300 | 269,000,000 | 325 | 295,900,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|----------------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------------|
| | Buku Pariwisata Daerah | | | | buku | 0 | | 00 | | 000 | | 0 | | 0 | 3,435,542,000 |
| | Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah | | | | 150 buku | 336,622,000 | 200 | 418,447,000 | 250 | 439,369,000 | 300 | 461,337,000 | 325 | 484,400,000 | 2,202,074,000 |
| V II I | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan dan Pemahaman atas kekayaan Budaya Daerah | | 70 orang | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Peninggalan Purbakala | | 1 Cagar Budaya | 77,443,000 | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai) | | 38 orang | 199,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Sasra Lisan Melayu Bangka Belitung | | 350 buku | 77,345,000 | | | | | | | | | | | |
| I X | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | 2,764,437,625 | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung) | | 86 pelaku usaha | 81,081,170 | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan sarana pendukung objek Wisata | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di | | 4 kegiatan | 1,098,068,055 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|---|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--------------------|
| | Destinasi Pariwisata | | an | | | | | | | | | | | | |
| | Perombaan Usaha Wisata Kuliner | | 50 pelaku usaha | 135,288,400 | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Paket Wisata Destinasi Perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 162 pelaku pariwisata dan dok kesepakan | 350,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan pemasangan Lampu taman 50 Titik di daya tarik wisata (DTW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 50 titik | 200,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | penyusunan kalender Event Pariwisata dan Budaya | | 1 paket buku | 200,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | Kajian dan Survei Geopark Pulau Bangka dan Study Observasi Marine Park | | 2 kawasan | 700,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Persentase daya tarik wisata provinsi yang dikelola | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung | | | 200,000,000 | 0 | - | 1 | 157,500,000 | 1 | 165,375,000 | 1 | 173,643,000 | 1 | 182,325,000 | 678,843,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|
| | penyusunan paket wisata | | | | 0 | - | 1 | 157,500,000 | - | - | 1 | 190,575,000 | - | - | 348,075,000 |
| | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | 1 | 92,118,000 | 1 | 149,112,600 | 2 | 156,568,000 | 2 | 164,396,000 | 2 | 172,616,000 | 784,704,600 |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat | | | | 1 | 171,,877,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177,515,000 |
| | Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya | | | | 1 | 617,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 710,060,000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata | | | | 4 | 117,885,000 | 5 | 189,654,000 | 5 | 199,136,000 | 5 | 209,093,000 | 5 | 219,548,000 | 998,054,000 |
| | Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Destinasi Pariwisata | | | | 5 | 2,506,547,000 | 10 | 4,177,324,000 | 10 | 4,386,190,000 | 10 | 4,605,400,000 | 14 | 4,835,774,000 | 21,983,092,000 |
| | Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata | | | | 10 | 148,118,000 | 14 | 220,000,000 | 14 | 231,000,000 | 14 | 242,550,000 | 14 | 254,677,500 | 1,148,227,500 |
| | Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung | | | | 1 | 327,312,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,000,000 |
| | Kegiatan Sosialisasi Paket Wisata Geowisata di Pulau Belitung | | | | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | |
| | Kegiatan Penyusunan Interpretasi berbasis | | | | 0 | 0 | 1 | 275.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 425.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|--|--------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-----------|------------|----------------------|--|
| | Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Penyusunan Interpretasi berbasis Ekowisata Bahari di Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau – Pulau Kecil Belitung | | | 0 | 0 | 1 | 275.000,00 | 1 | 350.000,00 | 1 | 400.000,00 | 1 | 425.000,00 | | |
| | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan | | | 3 kawasan | 103,120,00 | 3 kaw | 194,987,00 | 3 kaw | 204,735,00 | 3 kaw | 214,975,00 | 3 kawasan | 225,723,75 | 1,026,122,750 | |
| X | Program Pengembangan Kemitraan | | | 434,799,275 | | | | | | | | | | | |
| | Pendukung Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) | 120 orang | | 434,799,275 | | | | | | | | | | | |
| X I | Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya | | | 480,326,000 | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pembangunan karakter dan Budi Pekerti Bangsa | 156 siswa aubade dan GBN | | 480,326,000 | | | | | | | | | | | |
| X II | Program Peningkatan | Persentase | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|
| | Pelayanan Pemerintah | pelayanan administrasi pelayanan pemerintah | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100% | 1,975,115,000 | 100% | 2,578,081,000 | 100% | 2,835,889,100 | 100% | 3,119,478,010 | 100% | 3,431,425,811 | 14,308,583,921 |
| | Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 6 dok | 292,809,000 | 5 dok | 406,148,000 | 5 dok | 426,450,000 | 5 dok | 447,700,000 | 5 dok | 470,167,000 | 2,137,273,000 |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100% | 613,500,000 | 100% | 1,358,130,000 | 100% | 1,426,000,000 | 100% | 1,497,300,000 | 100% | 1,572,200,000 | 7,147,088,000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | | | | 6 dok | 218.687.000 | 6 dok | 240,555,700 | 6 dok | 264,611,000 | 6 dok | 291,072,000 | 6 dok | 320,179,600 | 1,335,106,000 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 10 orang | 70,360,000 | 10 org | 128,609,000 | 15 org | 147,900,000 | 17 org | 170,000,000 | 20 org | 195,500,000 | 753,843,000 |
| | Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat musik Rampak Gendang | | | | 60 unit | 487,565,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung | | | | 12 bulan | 442,900,000 | 12 bln | 600,000,000 | 12 bln | 650,000,000 | 12 bln | 700,000,000 | 12 bln | 750,000,000 | 3,142,900,000 |
| X II I | Program Pelestarian Budaya | Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikemb | | | | | | | | | | | | | |

| | | anggaran, dimanfaatkan dan dibina | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------------|
| | Kajian Tradisi Bangka Belitung | | | | 1 | 90,533,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 240,000,000 | 1 | 280,000,000 | 1 | 300,000,000 | 1,110,533,000 |
| | Penulisan Sejarah Bangka Belitung | | | | 1 | 212,131,000 | 1 | 250,000,000 | 1 | 275,000,000 | 1 | 280,000,000 | 1 | 295,000,000 | 1,312,131,000 |
| | Pengembangan Data Pokok Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung | | | | 80 | 53,255,000 | 80 | 75,000,000 | 80 | 80,000,000 | 80 | 85,000,000 | 80 | 90,000,000 | 383,255,000 |
| | Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung | | | | 422 | 110,059,500 | 450 | 150,000,000 | 450 | 160,000,000 | 500 | 200,000,000 | 500 | 225,000,000 | 845,059,500 |
| | Pemberian dukungan dan penghargaan serta kerjasama di bidang budaya | | | | 35 | 5,523,673,000 | 35 | 5,799,856,600 | 35 | 6,089,849,000 | 35 | 6,394,341,000 | 35 | 6,714,059,000 | 30,521,778,600 |
| | Pelatihan sejarah dan tradisi Bangka Belitung | | | | 0 | 0 | 50 | 200,000,000 | 50 | 210,000,000 | 50 | 220,500,000 | 50 | 231,525,000 | 862,025,000 |
| | Pagelaran pameran sejarah dan tradisi Bangka Belitung | | | | 6 | 97,633,000 | 6 | 120,000,000 | 6 | 125,000,000 | 6 | 130,000,000 | 6 | 140,000,000 | 612,633,000 |
| | Seminar Revitalisasi dan reaktualisasi sejarah dan tradisi Bangka Belitung | | | | 0 | 0 | 200 | 450,000,000 | 0 | 0 | 200 | 500,000,000 | 0 | 0 | 950,000,000 |
| | Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI | | | | 256 | 416,140,000 | 300 | 436,947,000 | 300 | 458,794,000 | 350 | 481,734,000 | 350 | 505,820,000 | 2,299,435,000 |
| | Lawatan Sejarah dan | | | | 200 | 0 | 200 | 450,000,000 | 0 | 0 | 200 | 500,000,000 | 0 | 0 | 950,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----------------------|
| | kemah budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi sarana dan prasarana cagar budaya dan museum daerah | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| | Pengelolaan cagar budaya | | | | 1 | 84,765,000 | 1 | 89,000,00 0 | 1 | 93,453,000 | 1 | 98,126,000 | 1 | 103,032,00 0 | 468,376,000 |
| | Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah | | | | 1 | 142,012,00 0 | 1 | 150,000,0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,000,00 0 | 492,012,000 |
| | Pelatihan Teknis Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 300,000,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung | | | | 50 | 106,509,00 0 | 50 | 200,000,0 00 | 0 | 0 | 50 | 225,000,00 0 | 0 | 0 | 531,509,000 |
| | Perintisan Museum Provinsi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,000,00 0 | 200,000,000 |
| | Kajian Cagar Budaya Bangka Belitung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250,000,00 0 | 0 | 0 | 250,000,000 |
| | Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah | | | | 0 | 0 | 0 | 682,500,0 00 | 1 | 716,625,00 0 | 1 | 754,456,00 0 | 0 | 790,079,00 0 | 2,943,660,000 |
| | Pengiriman Misi Kesenian Daerah | | | | 0 | 0 | 2 | 386,460,0 00 | 2 | 405,752,00 0 | 2 | 426,040,00 0 | 2 | 447,342,00 0 | 1,665,594,000 |
| | Pelaksanaan Workshop kesenian daerah | | | | 2 | 0 | 2 | 315,000,0 00 | 2 | 325,000,00 0 | 2 | 335,000,00 0 | 2 | 345,000,00 0 | 1,320,000,000 |
| | Pentas Seni Budaya | | | | 35 | 269,281,50 0 | 35 | 282,745,5 00 | 35 | 296,882,00 0 | 35 | 311,726,90 0 | 35 | 327,313,00 0 | 1,487,948,900 |
| | Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai | | | | 60 | 427,974,00 0 | 60 | 449,372,0 00 | 60 | 471,841,00 0 | 60 | 495,433,00 0 | 60 | 520,205,00 0 | 2,364,825,000 |
| | Bantuan | | | | 14 | 0 | 14 | 315,000,0 | 14 | 325,000,00 | 14 | 335,000,00 | 14 | 345,000,00 | 1,320,000,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|
| | Sarana dan prasarana Seni Tradisional | | | | | | 00 | | 0 | | 0 | | 0 | 00 |
| | Pelaksanaan Dialog Budaya | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350,000,00 | 0 | 0 | 1 | 400,000,00 | 750,000,000 |
| | Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Lagu Daerah | | | 20 | 0 | 20 | 150,000,000 | 20 | 160,000,000 | 20 | 170,000,000 | 20 | 180,000,000 | 660,000,000 |
| | Pengembangan Seni Kriya Tradisional | | | 5 | 0 | 5 | 125,000,000 | 5 | 145,000,000 | 5 | 165,000,000 | 5 | 185,000,000 | 620,000,000 |
| | Penyelenggaraan Perlindungan Seni Tradisi (Perekaman Digitalisasi & Penulisan Naskah) | | | 5 | 0 | 54 | 250,000,000 | 5 | 260,000,000 | 5 | 270,000,000 | 5 | 280,000,000 | 1,060,000,000 |
| | Festival Budaya Melayu | | | 1 | 950,000,000 | 1 | 997,500,000 | 1 | 1,047,375,000 | 1 | 1,099,743,500 | 1 | 1,154,730,000 | 5,249,348,500 |
| XVI | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Sumber Daya Pariwisata | | | | | 350 | 1,277,400,000 | 400 | 1,405,000,000 | 450 | 1,545,600,000 | 500 | 1,700,200,000 | 5,928,200,000 |
| | Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata | | | 300 | 1,178,677,500 | 300 | 1,296,545,000 | 350 | 1,361,382,000 | 400 | 1,429,441,000 | 450 | 1,500,913,000 | 5,588,281,000 |
| | Penyelenggaraan sertifikasi Lanjutan bagi Sumber Daya | | | | | 250 | 1,665,667,500 | 300 | 1,832,200,000 | 350 | 2,015,450,000 | 400 | 2,217,000,000 | 7,730,317,500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--|
| | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kerjasama Pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya pariwisata dengan asosiasi profesi dan LSP | | | | | 2 | 367,500,000 | 2 | 404,250,000 | 2 | 44,467,500 | 2 | 489,142,500 | 1,305,360,000 | |
| | Penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan Bangka Belitung | | 3 | 497,042,000 | 3 | 632,927,000 | 3 | 664,573,000 | 3 | 697,802,000 | 3 | 732,692,000 | 2,727,994,000 | | |
| | Penyelenggaraan Lokakarya pelatihan dan sertifikasi sumber daya pariwisata | | | | | 1 | 275,000,000 | 2 | 302,500,000 | 2 | 331,750,000 | 2 | 366,000,000 | 1,275,250,000 | |
| | penerapan sistem magang berbasis kompetensi bagi pelajar sektor kepariwisataan | | | | | 1 | 440,000,000 | 2 | 484,000,000 | 2 | 532,400,000 | 2 | 585,640,000 | 2,042,040,000 | |
| | pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil sertifikasi bagi sumber daya pariwisata | | | | | 1 | 148,610,000 | 1 | 163,471,000 | 1 | 179,800,000 | 1 | 197,799,000 | 689,680,000 | |
| | penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner | | 1 | 177,515,000 | 1 | 186,390,000 | 1 | 195,710,000 | 2 | 205,495,000 | 2 | 215,770,000 | 803,365,000 | | |
| | Pengembangan Industri Perfilman, Animasi, Video dan Fotografi | | | | | 2 | 618,313,000 | 2 | 680,177,000 | 2 | 748,195,000 | 2 | 823,000,000 | 2,869,685,000 | |
| | pengembangan seni | | | | | 1 | 501,363,000 | 2 | 551,499,000 | 2 | 606,649,000 | 2 | 667,314,000 | 2,326,825,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|
| | pertunjukan dan industri music | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Seni Rupa dan Seni Kriya | | | | | 1 | 361,416,000 | 1 | 397,557,000 | 2 | 437,313,000 | 2 | 481,000,000 | 1,677,286,000 | |
| | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Aplikasi dan Pengembangan Permainan | | | | | 1 | 302,500,000 | 1 | 332,750,000 | 1 | 366,000,000 | 1 | 402,627,500 | 1,403,877,500 | |
| | Pengembangan Desain dan Arsitektur | | | | | 1 | 385,000,000 | 1 | 423,500,000 | 1 | 465,800,000 | 1 | 512,435,000 | 1,786,735,000 | |
| | Fasilitasi Pengembangan Sentra Inovasi dan pusat kreatif | | | | | 1 | 611,105,000 | 1 | 672,215,500 | 2 | 739,437,000 | 2 | 813,300,000 | 2,836,057,500 | |
| | Pengembangan Cenderamata Khas Kepulauan Bangka Belitung | | | | | 2 | 495,000,000 | 2 | 544,500,000 | 2 | 59,895,000 | 2 | 658,800,000 | 1,758,195,000 | |
| | Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Kepariwisataan | | | | | 1 | 1,155,945,000 | 2 | 1,271,539,000 | 2 | 1,398,600,000 | 2 | 1,538,500,000 | 5,364,584,000 | |
| | Peningkatan serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah | | | | | 1 | 157,500,000 | 1 | 165,375,000 | 1 | 173,643,000 | 1 | 182,325,000 | 678,843,000 | |
| | Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah | | | | 1 | 177,783,000 | 1 | 186,672,000 | 2 | 196,000,000 | 2 | 205,806,000 | 2 | 216,000,000 | 804,478,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|----------------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor pariwisata | | | | | | 1 | 105,000,000 | 1 | 110,250,000 | 1 | 115,762,000 | 1 | 121,500,000 | 452,512,000 |
| kajian peran kelembagaan dan pelaku pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan | | | | | | 2 | 492,200,000 | 2 | 541,400,000 | 2 | 595,570,000 | 2 | 655,127,000 | 2,284,297,000 |
| pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan kepariwisataan | | | | | | 4 | 148,600,000 | 4 | 163,400,000 | 4 | 179,800,000 | 4 | 179,700,000 | 671,500,000 |
| pelatihan pengembangan industri Ekonomi Kreatif | | | | 60 | 710,060,000 | 72 | 745,500,000 | 84 | 782,841,000 | 96 | 821,900,000 | 108 | 863,000,000 | 3,213,241,000 |
| Dukungan Event Festival Nusantara | | | | 15 | 1,500,000,000 | 15 | 1,575,000,000 | 15 | 1,653,750,000 | 20 | 1,736,437,000 | 20 | 1,823,000,000 | 6,788,187,000 |

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG
MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2017 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| 1 | Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung | 1 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| 2 | Jumlah dokumen Penyusunan paket wisata | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | |
| 3 | Jumlah kawasan Daya Tarik Wisata Mangrove yang tertata | NA | 1 lokasi | - | - | - | - | |
| 4 | Jumlah Dokumen RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya | NA | 1 dokumen | - | - | - | - | |
| 5 | Jumlah Desa Wisata yang diberdayakan | | 5 Desa Wisata | 5 Desa Wisata | 5 Desa Wisata | 5 Desa Wisata | 5 Desa Wisata | |
| 6 | Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi di destinasi pariwisata kabupaten / kota | | 11Daya Tarik Wisata | 10 Daya Tarik Wisata | 10 Daya Tarik Wisata | 10 Daya Tarik Wisata | 14 Daya Tarik Wisata | |
| 7 | Jumlah penyusunan paket wisata | | 2 paket | 4 paket | 6 paket | 8 paket | 10 paket | |
| 8 | Jumlah naskah kajian tradisi | | 2 naskah | 4 naskah | 6 naskah | 8 naskah | 10 naskah | |
| 9 | Jumlah cagar budaya yang dikelola | | 2 Cagar Budaya | 3 cagar budaya | 4 cagar budaya | 5 cagar budaya | 6 Cagar Budaya | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 10 | Jumlah cetakan dan digitalisasi publikasi koleksi museum daerah | | 200 buah | 400 buah | 600 buah | 800 buah | 1000 buah | |
| 11 | Jumlah cagar budaya yang teregistrasi | | 20 BCB | 40 BCB | 60 BCB | 80 BCB | 100 BCB | |
| 12 | Jumlah Festival yang diselenggarakan | | 2 Festival | 3 Festival | 4 Festival | 5 Festival | 6 Festival | |
| 13 | Jumlah tim kesenian yang diberangkatkan | | 2 tim | 4 tim | 6 tim | 8 tim | 10 tim | |
| 14 | Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung | | 1 naskah | 2 naskah | 3 naskah | 4 naskah | 6 naskah | |
| 15 | jumlah sanggar yang dipentaskan | | 30 pentas | 60 pentas | 90 pentas | 120 pentas | 150 pentas | |
| 16 | Jumlah personel drum band yang dibina | | 1 kegiatan | |
| 17 | Jumlah Data Sejarah dan Tradisi yang dicatat dan validasi | | 80 data | 160 data | 320 data | 400 data | 480 data | |
| 18 | Jumlah Karya Cetak, Karya Rekam dan Digitalisasi | | 1 dokumen | 2 dokumen | 3 dokumen | 4 dokumen | 5 dokumen | |
| 19 | Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal PinangJumlah penggiat budaya | | 10 lembaga | 20 lembaga | 30 lembaga | 40 lembaga | 50 lembaga | |
| 20 | Jumlah event sejarah dan tradisi yang difasilitasi | | 4 event | 8 event | 12 event | 16 event | 20 event | |
| 21 | Jumlah peserta gita bahana dan aubade | | 100 orang | 200 orang | 300 orang | 400 orang | 635 orang | |
| 22 | Jumlah peserta bimbingan teknis sejarah dan tradisi | | 40 orang | 80 orang | 120 orang | 160 orang | 200 orang | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 23 | Jumlah apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan tradisi. | | 80 orang | 160 orang | 240 orang | 320 orang | 400 orang | |
| 24 | Jumlah peserta lawatan sejarah dan kemah budaya. | | 1 kegiatan | |
| 25 | jumlah cagar budaya dan museum daerah yang difasilitasi sarana dan prasarananya. | | 1 paket | 2 paket | 3 paket | 4 paket | 5 paket | |
| 26 | jumlah peserta pelatihan | | 10 orang | |
| 27 | Jumlah museum | | 1 museum | |
| 28 | jumlah kajian cagar budaya | | 2 dokumen | 4 dokumen | 6 dokumen | 8 dokumen | 10 dokumen | |
| 29 | jumlah workshop yang dilaksanakan | | 20 orang | 40 orang | 60 orang | 80 orang | 100 orang | |
| 30 | jumlah sanggar kesenian yang dibantu sarana dan prasarananya | | 5 sanggar | 10 sanggar | 15 sanggar | 20 sanggar | 25 sanggar | |
| 31 | Jumlah pelaksanaan dialog budaya | | 5 event dialog | 10 event dialog | 15 event dialog | 20 event dialog | 25 event dialog | |
| 32 | jumlah lagu daerah yang dilestarikan | | 200 orang | 400 orang | 600 orang | 800 orang | 1000 orang | |
| 33 | Jumlah jenis kriya yang dikembangkan | | 4 produk | 8 produk | 12 produk | 16 produk | 20 produk | |
| 34 | Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata | | 5 paket | 10 paket | 15 paket | 20 paket | 25 paket | |
| 35 | Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung | | 2 lokasi destinasi | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 36 | Jumlah media informasi yang berbasis IT | | 1 Media Website | |
| 37 | Tersedianya master publikasi pariwisata | | 1 Bh Master Publikasi | 2 Bh Master Publikasi | 3 Bh Master Publikasi | 4 Bh Master Publikasi | 5 Bh Master Publikasi | |
| 38 | Jumlah dokumen kajian pemasaran pariwisata Bangka Belitung | | 1 Dokumen | 0 dokumen | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 3 Dokumen | |
| 39 | Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di dalam dan luar daerah | | 4 event | 8 event | 12 event | 16 event | 20 event | |
| 40 | Jumlah pendukung event pariwisata | | 1 paket | 2 paket | 3 paket | 4 paket | 5 paket | |
| 41 | Jumlah peserta widyawisata pengenalan destinasi pariwisata | | 2 keg | 4 keg | 6 keg | 8 keg | 10 keg | |
| 42 | Jumlah kerjasama dengan media massa | | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 3 kegiatan | 4 kegiatan | 5 kegiatan | |
| 43 | Jumlah penyelenggaraan tour | | 0 event | 1 event | 1 event | 1 event | 1 event | |
| 44 | Jumlah partisipasi pelaku usaha pariwisata | | 0 event | 1 event | 1 event | 1 event | 1 event | |
| 45 | Jumlah partisipasi event promosi di luar negeri | | 0 event | 1 event | 0 event | 1 event | 1 event | |
| 46 | Jumlah rapat koordinasi pemasaran pariwisata | | 0 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | |
| 47 | Jumlah dokumen neraca satelit | | 225 buku | 250 buku | 300 buku | 325 buku | 350 buku | |
| 48 | Jumlah peserta sertifikasi sumber daya pariwisata | | 50 org | 100 orang | 150 orang | 200 orang | 250 orang | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 49 | Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Kepariwisataaan | | 3 event | |
| 50 | jumlah penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner | | 1 kegiatan | |
| 61 | Jumlah pertemuan Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan | | 1 kegiatan | |
| 62 | Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor pariwisata | | 1 kegiatan | |
| 63 | Jumlah orang yang terlatih dalam Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif | | 50 orang | 100 orang | 150 orang | 200 orang | 250 orang | |
| 64 | jumlah peserta pelatihan dasar sumber daya pariwisata | | 100 orang | 200 orang | 400 orang | 600 orang | 800 orang | |
| 65 | jumlah kegiatan pengembangan seni rupa dan seni kriya | | 20 pelaku usaha pariwisata | |
| 66 | jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan kelembagaan kepariwisataan | | 5 lembaga | |
| 67 | Jumlah promosi geowisata yang diselenggarakan | | 0 | 1 event | 1 event | 1 event | 1 event | |
| 68 | Jumlah promosi wisata edukatif, kreatif dan minat khusus yang diselenggarakan | | 0 | 1 event | 1 event | 1 event | 1 event | |
| 69 | Jumlah promosi kawasan ekonomi khusus yang di selenggarakan | | 0 | 1 event | 1 event | 1 event | 1 event | |
| 70 | Jumlah sosialisasi paket wisata Geowisata di Pulau Belitung yang diselenggarakan | | 0 | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 71 | Jumlah interpretasi berbasis geowisata paket wisata edukatif dan kreatif di Desa Wisata Pulau Belitung yang tersusun dan terbangun | | 0 | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | |
| 72 | Jumlah interpretasi berbasis ekowisata bahari di Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau – Pulau Kecil Belitung yang tersusun dan terbangun | | 0 | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | |
| 73 | Jumlah Buku Pariwisata Daerah | | 1000 buku | 2000 buku | 3000 buku | 4000 buku | 5000 buku | |

BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif. Posisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai institusi Pemerintah Provinsi, pada hakekatnya dominan pada fungsi penyedia dukungan yang mengarah kepada fasilitasi, regulasi, koordinasi, promosi dan memonitoring.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. Rivai
Pembina Utama Madya
Nip. 19600604 198701 1 001